

**RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2022**



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2021**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Rancangan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 ini disusun mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Rancangan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 berisi kebijakan pengawasan baik yang terkait dengan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan atas Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah serta Pemerintah Desa, demikian juga yang terkait dengan kebijakan intern, hubungan dengan auditi (obyek pengawasan), hubungan dengan sesama aparat pengawas intern pemerintah (APIP) dan auditor eksternal (BPK), maupun dengan masyarakat.

Proses penyusunan Rancangan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 memperhatikan rancangan renstra Inspektorat 2018-2023 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang akan dituangkan di dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Tahun 2019 Kabupaten Nganjuk adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang RPJPD Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 adalah menyediakan acuan secara umum yang akan dilaksanakan di Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022.

Tujuannya adalah melaksanakan program dan kegiatan sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pengawasan yang akuntabel.

1.4. Sistematika

Rancangan Awal Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rancangan Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA

INSPEKTORAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 pada dasarnya mengacu pada pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan juga terhadap kegiatan lainnya dilakukan secara Internal dan Eksternal.

Pengawasan Internal adalah pengawasan yang menjadi tanggungjawab dan atau oleh Pejabat Atasan Langsung terhadap bawahannya sebagai pelaksana di masing-masing Unit/Satuan Kerja juga disebut Pengawasan Melekat (Waskat). Pengawasan Eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh Pejabat di luar tanggungjawab Perangkat Daerah.

Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Daerah Kabupaten Nganjuk secara Internal oleh Inspektorat Kabupaten Nganjuk, sedangkan Pengawasan secara Eksternal dilaksanakan oleh Pengawasan Fungsional yaitu BPK-RI, BPKP, Inspektorat Jendral Depdagri dan Inspektorat Propinsi.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk merupakan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi dari Inspektorat yaitu pembinaan atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Urusan Pemerintahan Desa serta Pelaksanaan Pembangunan yang sifatnya Reguler/Rutin.

Untuk memperoleh kepastian terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang baik dan akuntabel, pengawasan merupakan tahapan yang harus dilalui. Pengawasan bukan hanya bersifat penindakan (Represif) tetapi juga bersifat pencegahan (Preventif). Hasil pengawasan yang dilakukan akan dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang baik dan akuntabel dengan sasaran :

1. Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel.
2. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang dapat berperan sebagai *catalyst*, *cosulting partner* dan *quality assurance*.

Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk dimaksud untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan diukur dengan indikator :

- Persentase rekomendasi LHP BPK-RI yang selesai ditindaklanjuti.
- Persentase tindak lanjut temuan yang selesai
- Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai A
- Persentase penyelesaian pengaduan publik
- Persentase temuan kerugian daerah dan kerugian negara yang selesai
- Level Kapabilitas APIP

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020 sampai dengan semester I didapatkan hasil sebagai berikut :

Sasaran Strategis			Satuan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Uraian	Indikator Kinerja					
1	2		3	4	5	6
Meningkatnya Pengawasan Penyelenggara-raan Pemerintahan Daerah yang akuntabel	1.	Prosentase rekomendasi LHP BPK-RI yang selesai ditindaklanjuti	%	86	97,47	113,33
	2.	Prosentase tindak lanjut temuan yang selesai	%	95	87,08	91,66
	3.	Prosentase kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai A	%	15	40	266,67
	4.	Prosentase penyelesaian pengaduan publik	%	90	100	111,11
	5.	Prosentase temuan kerugian daerah dan kerugian negara yang selesai	%	85	70,95	83,47
Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang dapat berperan sebagai catalyst, consulting partner dan quality assurance	6.	Level Kapabilitas APIP	level	3	66,67	66,67

Sedangkan hasil rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Inspektorat Daerah dan Pencapaian Renstra Inspektorat Daerah s.d Tahun 2020 disajikan pada tabel T-C.29 sebagai berikut:

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2019 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Target Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Urusan Pemerintahan									
	Fungsi Penunjang Pengawasan									
	Bidang Pengawasan									
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	90%	100%	80%	65%	81%	85%	85%	100%
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang diproses	800 surat	99.73	700 surat	556 surat	74.6	700 surat	700 surat	100
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah kebutuhan telepon dan listrik	4200 kwh dan telepon 12 bulan	78.45	4050 kwh dan telepon 12 bulan	4050 kwh dan telepon 12 bulan	100	4050 kwh dan telepon 12 bulan	4050 kwh dan telepon 12 bulan	100
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah kebutuhan jasa kebersihan	3000 m ² (12 bulan)	100	3000 m ² (12 bulan)	3000 m ² (12 bulan)	100	3000 m ² (12 bulan)	3000 m ² (12 bulan)	100
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang diadakan	40 jenis	99.39	35 jenis	25 jenis	71	40 jenis	40 jenis	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang diadakan	7 jenis cetak dan 30.000 penggandaan	73.71	6 jenis cetak dan 7.000 penggandaan	6 jenis cetak dan 7.000 penggandaan	100	7 jenis cetak dan 30.000 penggandaan	7 jenis cetak dan 30.000 penggandaan	100
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik	17 jenis	-	5 jenis	5 jenis	100	15 jenis	15 jenis	100

				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	20 buah	-	12 jenis	10 jenis	83	15 buah	15 buah	100
				Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah kebutuhan alat rumah tangga	18 jenis	-	15 jenis	15 jenis	100	15 jenis	15 jenis	100
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah kebutuhan bahan bacaan dan perundangan	6 jenis bacaan	88	3 jenis bacaan	2 jenis bacaan	80	5 jenis bacaan	5 jenis bacaan	100
				Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kebutuhan makanan dan minuman	Mamin harian, rapat, dan tamu 11 bulan	70.48	12 bulan	12 bulan	100	Mamin harian, rapat, dan tamu 11 bulan	Mamin harian, rapat, dan tamu 11 bulan	100
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan/ dihadiri	50 orang 12 bulan	99.98	12 bulan	12 bulan	100	50 orang 12 bulan	50 orang 12 bulan	100
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Monitoring dan evaluasi yang dilakukan	50 OPD	41.96	50 OPD selama 12 bulan	50 OPD selama 12 bulan	100	50 OPD	50 OPD	100
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang laik fungsi	85%	100%	85%	69%	80%	85%	85%	100%
				Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang diadakan	1 unit roda 4 (empat)	94.34	-	-	-	-	-	-
				Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	2 jenis	86.89	5 jenis	4 jenis	80	2 jenis	2 jenis	100
				Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	2 jenis	93.90	-	-	-	2 jenis	2 jenis	100
				Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	-	-	5 jenis	4 jenis	80	2 jenis	2 jenis	100
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas gedung kantor yang dipelihara	1200 m ²	99.96	1200 m ²	1200 m ²	83	1200 m ²	1200 m ²	100
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	17 unit	94.75	20 unit	20 unit	100	20 unit	20 unit	100
				Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	12 unit	95.63	10 unit	10 unit	100	12 unit	12 unit	100

				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	40 unit	78.16	35 unit	25 unit	71	37 unit	37 unit	100
				Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebeleur yang dipelihara	20 unit	99	-	-	-	20 unit	20 unit	100
				Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang memerlukan rehabilitasi/ perbaikan	2 unit	-	-	-	-	2 unit	2 unit	100
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kehadiran ASN	94%	100%	92%	92%	100%	93%	93%	100%
				Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	55 orang	93.03	-	-	-	50 orang	50 orang	100
				Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	55 orang	-	-	-	-	-	-	-
				Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	55 orang	-	45 orang	45 orang	100	50 orang	50 orang	100
				Penyediaan biaya instruktur senam PNS	Terlaksana-nya senam secara rutin	2 orang 12 bulan	46.88	2 orang 6 bulan	2 orang 6 bulan	100	2 orang 12 bulan	2 orang 12 bulan	100
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata nilai SKP ASN	84%	-	82%	82%	100%	83%	83%	100%
				Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi	25 orang	-	-	-	-	20 orang	20 orang	100
				Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya bimbingan teknis peraturan perundang-undangan sebanyak 1 kali	1 kali	-	1 kali	1 kali	100	1 kali	1 kali	100
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	90%	100%	85%	85%	100%	85%	85%	100%
				Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang selesai tepat waktu	8 laporan	86.75	5 laporan	5 laporan	100	8 laporan	8 laporan	100
				Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang selesai tepat waktu	2 laporan	84.01	-	-	-	2 laporan	2 laporan	100

				Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang selesai tepat waktu	12 laporan	-	-	-	-	12 laporan	12 laporan	100
				Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang selesai tepat waktu	1 laporan	85.52	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	1 laporan	100
				Penyusunan RENJA Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah	2 dokumen	-	-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	100
				Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase PKPT yang dilaksanakan	100%	100%	100%	80%	80%	100%	100%	100%
					Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	95%	-	90%	55%	61%	90%	90%	100%
				Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah Obwas yang diaudit dan dimonitor	97%	76.54	96%	100%	104	96%	96%	100
				Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Jumlah kasus pengaduan yang ditangani	95%	57.71	90%	100%	111	90%	90%	100
				Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Gelar pengawasan yang dilakukan	1 kali	63.17	1 kali	1 kali	100	1 kali	1 kali	100
				Inventaris temuan pengawasan	Inventarisasi kode temuan hasil pengawasan	95%	-	90%	100%	111	90%	90%	100
				Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan yang selesai	95%	60.64	90%	100%	111	90%	90%	100
				Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Jumlah ekspose pengawasan komprehensif	36 kali	-	12 kali	3 kali	25	24 kali	24 kali	100
				Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Jumlah evaluasi yang dilakukan	4 kali	80.22	4 kali	4 kali	100	4 kali	4 kali	100
				Pelaksanaan review terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Jumlah dokumen yang direview	1 dokumen	64.37	1 dokumen	1 doku-men	100	1 dokumen	1 dokumen	100

				Evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Jumlah dokumen yang dievaluasi	50 dokumen	79.62	-	-	-	50 dokumen	50 dokumen	100
				Pelaksanaan Review terhadap laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah dokumen yang direview	1 dokumen	74.36	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
				Pelaksanaan Evaluasi terhadap LPPD	Jumlah dokumen yang dievaluasi	50 dokumen	72.96	50 dokumen	50 dokumen	100	50 dokumen	50 dokumen	100
				Review RKA SKPD	Jumlah RKA yang direview	50 dokumen 2 kali	74.50	50 dokumen 2 kali	50 dokumen 2 kali	100	50 dokumen 2 kali	50 dokumen 2 kali	100
				Review penyerapan anggaran dan PBJ	Jumlah OPD yang direview	50 OPD	65.34	50 OPD	20 OPD	40	50 OPD	50 OPD	100
				Review RKPD	Jumlah dokumen yang direview	2 dokumen	42.50	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	2 dokumen	100
				Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Jumlah ATK kegiatan evaluasi	50 OPD	61.34	1 jenis	1 jenis	100	30 OPD	30 OPD	100
				Penyusunan PKPT	Dokumen PKPT	1 dokumen	-	-	-	-	1 doku-men	1 doku-men	100
				Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase aksi daerah percepatan pemberantasan korupsi yang mencapai target	80%	75%	75%	50%	67%	75%	75%	100%
					Cakupan Klinik Konsultasi	85%	85%	80%	40%	50%	85%	85%	100
				Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Jumlah kebijakan pengawasan yang disusun/ dibuat	3 dokumen	-	-	-	-	3 dokumen	3 dokumen	100
				Sosialisasi sistem dan prosedur pengawasan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi sistem dan prosedur pengawasan	350 ASN	93.48	-	-	-	300 ASN	300 ASN	100
				Pelayanan dan konsultasi pengawasan	Jumlah pelayanan dan konsultasi pengawasan yang dilakukan	12 kecamatan	95.84	8 kecamatan	8 kecamatan	100	135 Obwas	135 Obwas	100
				Pelaksanaan satuan tugas saber pungli	Terlaksana-nya pembinaan dan koordinasi satgas saber pungli	12 bln	31.74	6 bln	-	-	12 bln	12 bln	100
				Unit Pengendalian Gratifikasi	Prosentase Kepatuhan Pelaporan Gratifikasi pada OPD	60%	60.44	-	-	-	50%	50%	100

				RAD PPK	Prosentase pencapaian RAD PPK	90%	55.61	75%	71%	94	85%	85%	100
				Pengembangan Zona Integritas	Pencanangan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi	2 OPD	65.85	1 OPD	1 OPD	100	1 OPD	1 OPD	100
				Evaluasi PMPRB	Indeks RB	70%	-	-	-	-	60%	60%	100
				Survei Penilaian Integritas	Indeks Integritas	65%	-	-	-	-	60%	60%	100
				Program Peningkatan Profesionalise Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah auditor dan pejabat pengawas pemerintahan yang bersertifikat	16 orang	100%	16 orang	16 orang	100%	16 orang	16 orang	100%
					Jumlah aparatur pengawasan yang mengikuti diklat teknis kepengawasan	20 Orang	100%	20 Orang	20 Orang	100	20 Orang	20 Orang	100
				Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah APIP yang mengikuti pelatihan pengembangan kompetensi	40 orang	88.9	1 orang	1 orang	100	50 orang	50 orang	100
				Pendampingan, peningkatan kapabilitas APIP	Jumlah pendampiran yang dilakukan	4 kali	54.049	1 kali	1 kali	100	3 kali	3 kali	100
				Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	Jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP B dan BB	40 OPD	-	-	-	-	40 OPD	40 OPD	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Prosentase Rekomendasi LHP BPK-RI yang selesai ditindaklanjuti		√	86%	86.5%	87%	87,5%	97,47	86.5%	87%	87,5%	
2	Prosentase tindak lanjut temuan yang selesai	√	√	95%	95%	95%	95%	87,08	95%	95%	95%	
3	Prosentase kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai A.			15%	20%	25%	30%	40	20%	25%	30%	
4	Prosentase penyelesaian pengaduan publik		√	90%	90%	90%	90%	100	90%	90%	90%	
5	Prosentase temuan kerugian daerah dan kerugian negara yang selesai			85%	90%	90%	95%	70,95	90%	90%	95%	
6	Level Kapabilitas APIP	√		3	3	4	4	2	3	3	4	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Meskipun dari hasil pengukuran tingkat capaian kinerja menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan tercapai, tetapi masih terdapat beberapa permasalahan yang disebabkan :

- **Permasalahan Internal**

- a. Personil

- Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah dan Auditor hanya berjumlah 20 Orang;
- Jabatan Fungsional Pranata Komputer hanya berjumlah 1 Orang;
- Staf untuk membantu di 4 Irbanwil 6 Orang;
- Staf Sekretariat hanya berjumlah 9 Orang.

- b. Pendanaan

1. Biaya operasional dan insentif belum menunjang untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan, namun senantiasa dilakukan upaya perbaikan untuk mendukung kinerja organisasi.

- c. Sarana – Prasarana

- 1) Kendaraan roda – 2 dan roda – 4 masih kurang untuk kepentingan operasional;
- 2) Kurangnya bangunan penunjang untuk keamanan kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- 3) Kurangnya almari arsip untuk penyimpanan berkas dokumen-dokumen penting Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk;
- 4) Belum adanya *Closed-circuit television (CCTV)* untuk keamanan kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Sebagai upaya menghadapi kendala tersebut, sebagai alternatif jangka pendek ditempuh hal-hal sebagai berikut :

- a. Untuk pemeriksaan/ pengawasan pelaksanaannya dibantu oleh Staf yang ada di Irbanwil Inspektorat daerah Kabupaten Nganjuk;
- b. Untuk pelaksanaan pada Sekretariat mengoptimalkan Staf yang ada, sehingga pekerjaan tidak dapat maksimal;
- c. Mengefektifkan tenaga kontrak dalam operasional kegiatan Inspektorat. Disamping upaya-upaya tersebut telah direncanakan program pengembangan yaitu :
 - a. Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Study Banding bagi seluruh karyawan/ti Inspektorat daerah Kabupaten Nganjuk;

b. Pengiriman karyawan/ti untuk mengikuti Diklat/ Workshop untuk menambah wawasan mengenai pengawasan.

- **Permasalahan Eksternal**

- 1) Perangkat Daerah yang telah diperiksa tidak segera menyampaikan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan/pengawasan;
- 2) Pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang mendukung (nama, instansi, dan waktu kejadian), hal ini mengakibatkan kesulitan dalam penanganan kasus.

Sebagai upaya menghadapi kendala tersebut, sebagai alternatif jangka pendek ditempuh hal-hal sebagai berikut :

- 1) Secara berkala melakukan penagihan kepada Perangkat Daerah yang telah telah diperiksa untuk segera menyampaikan tindaklanjut hasil temuan pemeriksaan/pengawasan;
- 2) Memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan Instansi terkait agar setiap pengaduan dilengkapi dengan bukti-bukti yang mendukung.

Sesuai dengan Surat Perintah Pelaksana Tugas dari Bupati Nganjuk, maka kondisi akhir Tahun 2020 Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

NO	PEJABAT	PANGKAT/ GOLONGAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Inspektur	IV/c (Pembina Utama Muda)	S2	1
2	Irbanwil I	IV/b (Pembina TK I)	S1	1
3	Irbanwil II	IV/b (Pembina TK I)	S2	1
4	Irbanwil III	IV/b (Pembina TK I)	S2	1
5	Irbanwil IV	IV/b (Pembina TK I)	S2	1
6	P2UPD	IV/a (Pembina)	S2	1
7	P2UPD	IV/a (Pembina)	S1	1
8	P2UPD	III/d (Penata TK I)	S1	1
9	P2UPD	III/c (Penata)	S1	1
10	Auditor Muda	III/d (Penata Tk. I)	S2	1
11	Auditor Muda	III/d (Penata Tk. I)	S1	1
12	Auditor Muda	III/c (Penata)	SI	6
13	Auditor Pertama	III/b (Penata Muda TK I)	S1	5
14	Auditor Penyelia	III/c (Penata)	SI	1
15	Auditor Pelaksana Lanjutan	III/a (Penata Muda)	S1	1
16	Auditor Pelaksana Lanjutan	III/b (Penata Muda TK I)	D3	1
17	Pranata Komputer	III/b (Penata Muda TK I)	S1	1
18	Kasubag Adm dan Umum	III/d (Penata Tingkat I)	S1	1
19	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	III/d (Penata Tingkat I)	S1	1
20	Kasubbag Perencanaan	III/c (Penata)	S1	1

21	Fungsional Umum	III/d (Penata Tk. I)	S2	1
22	Fungsional Umum	III/c (Penata)	S1	1
23	Fungsional Umum	III/a (Penata Muda)	S1	2
24	Fungsional Umum	II/a (Pengatur Muda)	SLTA	1
JUMLAH				34

2.4.Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kabupaten Nganjuk
Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Perangkat Daerah	90%	9.336.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Perangkat Daerah	90%	9.336.000.000	
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	90%	14.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	90%	14.000.000	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	2 dokumen	4,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	2 dokumen	4,000,000	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah laporan kinerja yang selesai tepat waktu	7 laporan	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah laporan kinerja yang selesai tepat waktu	7 laporan	10,000,000	
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun	80%	7.002.500.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun	80%	7.002.500.000	

6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah Kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	7,000,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah Kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	7,000,000,000	
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang selesai tepat waktu	1 laporan	2,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang selesai tepat waktu	1 laporan	2,500,000	
8	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun	80%	442.500.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun	80%	442.500.000	
9	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	50 orang	22,500,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	50 orang	22,500,000	
10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	APIP yang mengikuti pelatihan	45 orang	300,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	APIP yang mengikuti pelatihan	45 orang	300,000,000	
			Terlaksananya senam secara rutin	11 bulan				Terlaksananya senam secara rutin	11 bulan		
11	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah peserta sosialisasi	30 orang	40,000,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah peserta sosialisasi	30 orang	40,000,000	
12	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP B dan BB	40 OPD	80,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP B dan BB	40 OPD	80,000,000	
			Jumlah pendampingan yang dilakukan	3 kali				Jumlah pendampingan yang dilakukan	3 kali		
			Jumlah peserta bimtek	40 orang				Jumlah peserta bimtek	40 orang		
13	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	90%	688.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	90%	688.000.000	
14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah kebutuhan alat listrik	17 jenis	10,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah kebutuhan alat listrik	17 jenis	10,000,000	

15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	20 buah	10,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	20 buah	10,000,000	
16	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah kebutuhan alat rumah tangga	18 jenis	7,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah kebutuhan alat rumah tangga	18 jenis	7,000,000	
17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah ATK yang diadakan	40 jenis	150,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah ATK yang diadakan	40 jenis	150,000,000	
			Tersedianya makan dan minum	11 bulan				Tersedianya makan dan minum	11 bulan		
18	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Terlaksananya sistem pemerintahan yang berbasis elektronik	1 paket	200,000,000	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Terlaksananya sistem pemerintahan yang berbasis elektronik	1 paket	200,000,000	
19	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang diadakan	7 jenis cetakan dan 30.000 penggandaan	40,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang diadakan	7 jenis cetakan dan 30.000 penggandaan	40,000,000	
20	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah kebutuhan bahan bacaan dan perundangan yang diadakan	6 jenis	6,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah kebutuhan bahan bacaan dan perundangan yang diadakan	6 jenis	6,000,000	
21	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah kebutuhan makanan dan minuman tamu yang diadakan	11 bulan	15,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah kebutuhan makanan dan minuman tamu yang diadakan	11 bulan	15,000,000	
22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah kebutuhan makanan dan minuman rapat dan tamu yang diadakan	11 bulan	200,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah kebutuhan makanan dan minuman rapat dan tamu yang diadakan	11 bulan	200,000,000	
			Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan/ dihadiri	36 kegiatan				Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan/ dihadiri	36 kegiatan		
			Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan	50 OPD				Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan	50 OPD		

23	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Terlaksananya pengamanan arsip di Perangkat Daerah	1 kegiatan	50,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Terlaksananya pengamanan arsip di Perangkat Daerah	1 kegiatan	50,000,000	
24	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Persentase sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah	80%	670,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Persentase sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah	80%	670,000,000	
25	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang diadakan	1 unit roda 4 (empat)	300,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang diadakan	1 unit roda 4 (empat)	300,000,000	
26	Pengadaan Mebel	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah mebeleur yang diadakan	4 jenis	120,000,000	Pengadaan Mebel	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah mebeleur yang diadakan	4 jenis	120,000,000	
27	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin yang diadakan	21 buah	250,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin yang diadakan	21 buah	250,000,000	
28	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Persentase jasa umum dan penunjang perangkat daerah	90%	207.100.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Persentase jasa umum dan penunjang perangkat daerah	90%	207.100.000	
29	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah surat yang diproses	800 surat	9,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah surat yang diproses	800 surat	9,000,000	
30	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah kebutuhan listrik	12 bulan -	110,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah kebutuhan listrik	12 bulan -	110,000,000	
31	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah kebutuhan jasa kebersihan 3000 m2	12 bulan	60,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah kebutuhan jasa kebersihan 3000 m2	12 bulan	60,000,000	
32	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Persentase sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah	80%	340,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Persentase sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah	80%	340,000,000	

33	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	20 unit	120,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	20 unit	120,000,000	
34	Pemeliharaan Mebel	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah mebeleur yang dipelihara	20 unit	20,000,000	Pemeliharaan Mebel	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah mebeleur yang dipelihara	20 unit	20,000,000	
35	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	37 unit	75,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	37 unit	75,000,000	
36	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Luas gedung kantor yang dipelihara	1200 m2	125,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Luas gedung kantor yang dipelihara	1200 m2	125,000,000	
37	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Persentase PKPT yang dilaksanakan	90%	1.009.696.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Persentase PKPT yang dilaksanakan	90%	1.009.696.000	
38	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Terselenggaranya pengawasan internal	100%	934,696,000	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Terselenggaranya pengawasan internal	100%	934,696,000	
39	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah obwas yang diaudit dan dimonitor	8 OPD	300,000,000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah obwas yang diaudit dan dimonitor	8 OPD	300,000,000	
40	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah obwas yang diaudit dan dimonitor	10 OPD	124,696,000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah obwas yang diaudit dan dimonitor	10 OPD	124,696,000	
41	Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen LKjIP yang direviu	-	10,000,000	Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen LKjIP yang direviu	-	10,000,000	
			Jumlah dokumen LPPD yang direviu	1 dokumen				Jumlah dokumen LPPD yang direviu	1 dokumen		
42	Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen LKPD yang direviu	1 dokumen	50,000,000	Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen LKPD yang direviu	1 dokumen	50,000,000	
			Jumlah OPD yang direviu	30 OPD				Jumlah OPD yang direviu	30 OPD		

			Jumlah dokumen RKA PD	50 OPD				Jumlah dokumen RKA PD	50 OPD		
43	Pengawasan Desa	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah obwas yang diaudit dan dimonitor	264 desa	150,000,000	Pengawasan Desa	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah obwas yang diaudit dan dimonitor	264 desa	150,000,000	
44	Kerjasama Pengawasan Internal	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Gelar pengawasan yang dilakukan	1 kali	50,000,000	Kerjasama Pengawasan Internal	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Gelar pengawasan yang dilakukan	1 kali	50,000,000	
			Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi sistem dan prosedur pengawasan	100 ASN				Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi sistem dan prosedur pengawasan	100 ASN		
45	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Inventarisasi kode temuan hasil pengawasan	100%	250,000,000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Inventarisasi kode temuan hasil pengawasan	100%	250,000,000	
			Jumlah evaluasi yang dilakukan	4 kali				Jumlah evaluasi yang dilakukan	4 kali		
			Tindak Lanjut hasil temuan pengawasan yang selesai	95%				Tindak Lanjut hasil temuan pengawasan yang selesai	95%		
46	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Terselenggaranya pengawasan dengan tujuan tertentu	95%	75.000.000	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Terselenggaranya pengawasan dengan tujuan tertentu	95%	75.000.000	
47	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Pelimpahan kasus yang ditangani	90%	25.000,000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Pelimpahan kasus yang ditangani	90%	25.000,000	
48	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Kasus pengaduan yang ditangani	96%	50.000.000	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Kasus pengaduan yang ditangani	96%	50.000.000	
			Jumlah obwas yang diaudit dan dimonitor	4 OPD				Jumlah obwas yang diaudit dan dimonitor	4 OPD		
49	PROGRAM PERUMUSAN KEBIKAJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Persentase aksi daerah percepatan pemberantasan korupsi yang mencapai target	75%	470.000.000	PROGRAM PERUMUSAN KEBIKAJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Persentase aksi daerah percepatan pemberantasan korupsi yang mencapai target	75%	470.000.000	
50	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Tersusunnya kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	100%	90.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Tersusunnya kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	100%	90.000.000	

51	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah Dokumen Pengawasan yang disusun	2 dokumen	30,000,000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah Dokumen Pengawasan yang disusun	2 dokumen	30,000,000	
52	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Cakupan klinik konsultasi	6 kecamatan	60,000,000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Cakupan klinik konsultasi	6 kecamatan	60,000,000	
53	Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Persentase aksi daerah percepatan pemberantasan korupsi yang mencapai target	75%	380.000.000	Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Persentase aksi daerah percepatan pemberantasan korupsi yang mencapai target	75%	380.000.000	
54	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Evaluasi dan pemantauan SPIP	30 OPD	90,000,000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Evaluasi dan pemantauan SPIP	30 OPD	90,000,000	
		Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah expose pengawasan komprehensif	10 kali			Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah expose pengawasan komprehensif	10 kali		
		Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen SAKIP yang dievaluasi	50 dokumen			Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen SAKIP yang dievaluasi	50 dokumen		
55	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kabupaten Nganjuk	Jumlah perangkat daerah yang didampingi	50 OPD	40,000,000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kabupaten Nganjuk	Jumlah perangkat daerah yang didampingi	50 OPD	40,000,000	
56	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kabupaten Nganjuk	Jumlah pelaporan gratifikasi pada perangkat daerah yang ditangani	100%	200,000,000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kabupaten Nganjuk	Jumlah pelaporan gratifikasi pada perangkat daerah yang ditangani	100%	200,000,000	
		Kabupaten Nganjuk	Terlaksananya asistensi rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi	14 OPD			Kabupaten Nganjuk	Terlaksananya asistensi rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi	14 OPD		
		Kabupaten Nganjuk	Terlaksananya pembinaan dan koordinasi satgas saber pungli	12 bulan			Kabupaten Nganjuk	Terlaksananya pembinaan dan koordinasi satgas saber pungli	12 bulan		
57	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kabupaten Nganjuk	Jumlah perangkat daerah yang didampingi	50 OPD	50,000,000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kabupaten Nganjuk	Jumlah perangkat daerah yang didampingi	50 OPD	50,000,000	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk yang memiliki tugas dalam pengawasan internal memiliki permasalahan dalam mengawal tata kelola Pemerintah Daerah yang baik yaitu rendahnya tingkat maturitas SPIP Pemerintah Daerah masih pada Level 2 dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) belum mampu berperan sebagai QA (*Quality Assurance*) bagi Perangkat Daerah.

Rendahnya tingkat maturitas dapat dilihat dari turunnya opini BPK atas LKPD (WTP menjadi WDP) pada Tahun 2016, target RAD PPK dalam upaya pencegahan korupsi belum dapat tercapai (nilai masih dibawah 75%), rendahnya nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah (CC pada Tahun 2017) meskipun pada Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Nganjuk dapat meraih nilai B (baik) tetapi masih dalam B (baik) yang kurang yaitu 61,24.

Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk masih pada Level 2 dan belum memiliki kompetensi yang merata, ini membuktikan bahwa Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) belum bisa berperan sebagai QA (*Quality Assurance*). Terlihat juga dari masih banyaknya temuan hasil pengawasan eksternal pada Perangkat Daerah yang membutuhkan banyak perbaikan pada sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundang-undangan atau struktur/ manajemen Perangkat Daerah.

Permasalahan diatas disebabkan karena Perangkat Daerah belum mampu mengidentifikasi resikonya sehingga belum dapat memetakan resiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah yang bersangkutan. Sebab lain adalah bahwa objek pengawasan kurang sebanding dengan jumlah auditor sehingga hasil pengawasan menjadi kurang maksimal, termasuk juga anggaran yang terbatas menjadi kendala bagi pelaksanaan operasional pengawasan.

❖ **Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Dengan Visinya:

“Mewujudkan Kabupaten Nganjuk Yang Maju dan Bermartabat (Nganjuk Nyawiji Bangun Deso Noto Kutho)”

Misi ke-2 Bupati terpilih adalah:

“Meningkatkan Kinerja Birokrasi Bersih, Profesional Dan Accountable Demi Masyarakat Kabupaten Nganjuk Yang Efektif Dan Efisien Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Aspiratif, Partisipatif, Dan Transparan”

Sasaran ke-1 dari Misi ke-2 Bupati terpilih adalah:

“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik”

Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien melalui penyelenggaraan pemerintahan yang professional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, akan dilakukan upaya-upaya yang maksimal untuk mencapai terwujudnya visi dan misi tersebut.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih berharap kepada seluruh masyarakat Nganjuk untuk membantu memberikan dukungan dengan ikut serta dalam pelaksanaan visi dan misinya menuju masyarakat Nganjuk yang makmur, sejahtera dan damai (dengan akhlak yang mulia).

Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kepala Daerah mengharuskan setiap SKPD bersama-sama melakukan optimalisasi yang berbasis kinerja dengan anggaran yang tersedia untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah. Selain itu Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian intern dengan mengedepankan pembinaan dalam setiap kegiatan pengawasan.

❖ **Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Timur**

Renstra Kementerian Dalam Negeri tahun 2015-2019

Dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri terkait dengan tupoksi pengawasan dapat dijelaskan:

- Sasaran Strategis:

- a. Menguatnya peran Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
 - b. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan Keuangan Kemendagri untuk mendapatkan opini BPK atas Laporan Keuangan dengan predikat WTP berbasis akrual;
 - c. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi untuk mendapatkan akuntabilitas kinerja kategori A dan Indeks RB kategori B.
- Program :
Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan sasaran program:
 - a. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and good government) dilingkungan Kementerian Dalam Negeri;
 - b. Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang baik dan pemerintahan yang berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rancangan Renja Perangkat Daerah

❖ Tujuan

Dalam Renstra 2018 - 2023, Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk telah menetapkan tujuan organisasi sebagai arah strategik menuju perbaikan kinerja selama 5 (lima) tahun sesuai fungsi organisasi. Tujuan tersebut adalah:

“Tata Kelola Pemerintahan Dan Pengawasan Yang Akuntabel”

❖ Sasaran

Dari tujuan tersebut maka ditentukan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel
2. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dapat berperan sebagai *catalyst, consulting partner dan quality assurance*

3.3. Program dan Kegiatan

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Kabupaten Nganjuk

OPD: Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	90%	9.336.000.000	APBD		90%	8.903.505.500
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)		90%	14.000.000	APBD		85%	10.207.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang disusun tepat waktu		2 dokumen	4,000,000	APBD		3 dokumen	2.791.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang selesai tepat waktu		7 laporan	10,000,000	APBD		7 laporan	7.416000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun		80%	7.002.500.000	APBD		100%	7.367.184.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Kebutuhan gaji dan tunjangan ASN		12 bulan	7,000,000,000	APBD		12 bulan	7.365.696.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang selesai tepat waktu		1 laporan	2,500,000	APBD		1 laporan	1.488.000

				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun		80%	442.500.000	APBD		80%	360.775.200
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan		50 orang	22,500,000	APBD		-	-
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	APIP yang mengikuti pelatihan		45 orang	300,000,000	APBD		45 orang	250.641.000
					Terlaksananya senam secara rutin		11 bulan				11 bulan	
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta sosialisasi		30 orang	40,000,000	APBD		30 orang	33.605.000
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP B dan BB		50 OPD	80,000,000	APBD		50 OPD	76.529.200
					Jumlah pendampingan yang dilakukan		3 kali				3 kali	
					Jumlah peserta bimtek		40 orang				40 orang	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah		90%	688.000.000	APBD		90%	436.202.300
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik		17 jenis	10,000,000	APBD		15 jenis	7.000.000
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan		20 buah	10,000,000	APBD		15 buah	8.904.980
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan alat rumah tangga		18 jenis	7,000,000	APBD		15 jenis	4.998.250
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang diadakan		40 jenis	150,000,000	APBD		25 jenis	133.526.570
					Tersedianya makan dan minum		11 bulan				11 bulan	
				Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada	Terlaksananya sistem pemerintahan yang berbasis elektronik		1 paket	200,000,000	APBD		1 paket	200,000,000

				SKPD								
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang diadakan		7 jenis cetakan dan 30.000 penggandaan	40,000,000	APBD		7 jenis cetakan dan 30.000 penggandaan	34.965.000
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah kebutuhan bahan bacaan dan perundangan yang diadakan		6 jenis	6,000,000	APBD		3 jenis	5,000,000
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kebutuhan makanan dan minuman tamu yang diadakan		11 bulan	15,000,000	APBD		11 bulan	12.787.500
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kebutuhan makanan dan minuman rapat dan tamu yang diadakan		11 bulan	200,000,000	APBD		11 bulan	179.020.000
					Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan/ dihadiri		36 kegiatan				36 kegiatan	
					Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan		50 OPD				50 OPD	
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya pengamanan arsip di Perangkat Daerah		1 kegiatan	50,000,000	APBD		-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah		80%	670,000,000	APBD		80%	233.969.400
				Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang diadakan		1 unit roda 4 (empat)	300,000,000	APBD		1 unit roda 4 (empat)	300,000,000
				Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang diadakan		4 jenis	120,000,000	APBD		4 jenis	120,000,000
				Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin yang diadakan		21 buah	250,000,000	APBD		21 buah	250,000,000
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa umum dan penunjang perangkat daerah		90%	207.100.000	APBD		90%	207.100.000

				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diproses		800 surat	9,000,000	APBD		700 surat	8.500.000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan listrik		12 bulan -	110,000,000	APBD		12 bulan -	144.600,000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah kebutuhan jasa kebersihan 3000 m2		12 bulan	60,000,000	APBD		12 bulan	54,000,000
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah		80%	340,000,000	APBD		80%	340,000,000
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara		20 unit	120,000,000	APBD		20 unit	99.999.600
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dipelihara		20 unit	20,000,000	APBD		20 unit	13.000.000
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara		37 unit	75,000,000	APBD		37 unit	70.068.000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara		1200 m2	125,000,000	APBD		1200 m2	105.000.000
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase PKPT yang dilaksanakan		90%	1.009.696.000	APBD		90%	654.506.500
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terselenggaranya pengawasan internal		100%	934,696,000	APBD		100%	596.586.500
				Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah obwas yang diaudit dan dimonitor		8 OPD	300,000,000	APBD		4 OPD	157.828.000000
				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah obwas yang diaudit dan dimonitor		10 OPD	124,696,000	APBD		13 OPD	21.630.000
				Reviu Laporan Kinerja	Jumlah dokumen LKjIP yang direviu		-	10,000,000	APBD		-	8.836.000
					Jumlah dokumen LPPD yang direviu		1 dokumen				1 dokumen	
				Reviu Laporan Keuangan	Jumlah dokumen LKPD yang direviu		1 dokumen	50,000,000	APBD		1 dokumen	43.643.000
					Jumlah OPD yang direviu		30 OPD				30 OPD	

					Jumlah dokumen RKA PD		50 OPD			50 OPD	
					Pengawasan Desa	Jumlah obwas yang diaudit dan dimonitor	264 desa	150,000,000	APBD	264 desa	100.980.000
					Kerjasama Pengawasan Internal	Gelar pengawasan yang dilakukan	1 kali	50,000,000	APBD	1 kali	38.372.000
						Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi sistem dan prosedur pengawasan	100 ASN			100 ASN	
					Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inventarisasi kode temuan hasil pengawasan	100%	250,000,000	APBD	100%	225.297.500
						Jumlah evaluasi yang dilakukan	4 kali			4 kali	
						Tindak Lanjut hasil temuan pengawasan yang selesai	95%			95%	
					Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terselenggaranya pengawasan dengan tujuan tertentu	95%	75.000.000	APBD	95%	57.920.000
					Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Pelimpahan kasus yang ditangani	90%	25.000,000	APBD	90%	11.800.000
					Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kasus pengaduan yang ditangani	96%	50.000.000	APBD	96%	46.120.000
						Jumlah obwas yang diaudit dan dimonitor	4 OPD			4 OPD	
					PROGRAM PERUMUSAN KEBIKAJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase aksi daerah percepatan pemberantasan korupsi yang mencapai target	75%	470.000.000	APBD	75%	357.684.000
					Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Tersusunnya kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	100%	90.000.000	APBD	100%	43.384.000
					Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Dokumen Pengawasan yang disusun	2 dokumen	30,000,000	APBD	-	-

				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Cakupan klinik konsultasi		6 kecamatan	60,000,000	APBD		6 kecamatan	43.384.000
				Pendampingan dan Asistensi	Persentase aksi daerah percepatan pemberantasan korupsi yang mencapai target		75%	380.000.000	APBD		85%	314.300.000
				Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Evaluasi dan pemantauan SPIP		30 OPD	90,000,000	APBD		30 OPD	73.498.500
					Jumlah ekspose pengawasan komprehensif		10 kali				10 kali	
					Jumlah dokumen SAKIP yang dievaluasi		50 dokumen				50 dokumen	
				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang didampingi		50 OPD	40,000,000			30 OPD	34.874.000
				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah laporan gratifikasi pada perangkat daerah yang ditangani		100%	200,000,000			95%	173.915.000
					Terlaksananya asistensi rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi		14 OPD				14 OPD	
					Terlaksananya pembinaan dan koordinasi satgas saber pungli		12 bulan				12 bulan	
				Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah perangkat daerah yang didampingi		50 OPD	50,000,000	APBD		50 OPD	50,000,000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

No	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Keluaran Kegiatan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Hasil Kegiatan	
					Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja			Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
1	2	3	4	6	8	9	10	11	12	13
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			14,000,000						
1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4,000,000	Jumlah dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	2 dokumen	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Inspektorat Daerah	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	85%
2			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10,000,000	Jumlah laporan kinerja yang selesai tepat waktu	7 laporan	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Inspektorat Daerah	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	85%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		7,002,500,000						
3			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,000,000,000	Jumlah Kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Inspektorat Daerah	Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	100%

4		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,500,000	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang selesai tepat waktu	1 laporan	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Inspektorat Daerah	Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		442,500,000						
5		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	22,500,000	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	50 orang	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Inspektorat Daerah	Persentase dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun	80%
6		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	300,000,000	APIP yang mengikuti pelatihan	45 orang	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Yogyakarta, Surabaya	Persentase dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun	80%
				Terlaksananya senam secara rutin	11 bulan				
7		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40,000,000	Jumlah peserta sosialisasi	30 orang	Kabupaten Nganjuk	Kabupaten Nganjuk	Persentase dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun	80%
8		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80,000,000	Jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP B dan BB	50 OPD	Kabupaten Nganjuk	Kabupaten Nganjuk	Persentase dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun	80%
				Jumlah pendampingan yang dilakukan	3 kali				

			Jumlah peserta bimtek	40 orang				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	688,000,000						
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,000,000	Jumlah kebutuhan alat listrik	17 jenis	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Inspektorat Daerah	Terselanggaran ya administrasi umum perangkat daerah	90%
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10,000,000	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	20 buah	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Inspektorat Daerah	Terselanggaran ya administrasi umum perangkat daerah	90%
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7,000,000	Jumlah kebutuhan alat rumah tangga	18 jenis	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Inspektorat Daerah	Terselanggaran ya administrasi umum perangkat daerah	90%
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150,000,000	Jumlah ATK yang diadakan	40 jenis	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Inspektorat Daerah	Terselanggaran ya administrasi umum perangkat daerah	90%
			Tersedianya makan dan minum	11 bulan				
13	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	200,000,000	Terlaksananya sistem berbasis elektronik	1 paket	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Inspektorat Daerah	Terselanggaran ya administrasi umum perangkat daerah	90%
14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40,000,000	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang diadakan	7 jenis cetakan dan 30.000 penggandaan	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Inspektorat Daerah	Terselanggaran ya administrasi umum perangkat daerah	90%

15		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,000,000	Jumlah kebutuhan bahan bacaan dan perundangan yang diadakan	6 jenis	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Inspektorat Daerah	Terselanggaran ya administrasi umum perangkat daerah	90%
16		Fasilitasi Kunjungan Tamu	15,000,000	Jumlah kebutuhan makanan dan minuman tamu yang diadakan	11 bulan	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Inspektorat Daerah	Terselanggaran ya administrasi umum perangkat daerah	90%
17		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200,000,000	Jumlah kebutuhan makanan dan minuman rapat dan tamu yang diadakan	11 bulan	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Indonesia	Terselanggaran ya administrasi umum perangkat daerah	90%
				Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan/ dihadiri	36 kegiatan				
				Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan	50 OPD				
18		Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	50,000,000	Terlaksananya pengamanan arsip di perangkat daerah	1 kegiatan	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Inspektorat Daerah	Terselanggaran ya administrasi umum perangkat daerah	90%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		670,000,000						
19		Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	300,000,000	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang diadakan	1 unit roda 4 (empat)	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Persentase sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah	100%

20		Pengadaan Mebel	120,000,000	Jumlah mebel yang diadakan	4 jenis	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Persentase sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah	100%
21		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	250,000,000	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin yang diadakan	21 buah	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Inspektorat Daerah	Persentase sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		179,000,000						
22		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9,000,000	Jumlah surat yang diproses	800 surat	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Inspektorat Daerah	Persentase jasa umum dan penunjang perangkat daerah	90%
23		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110,000,000	Jumlah kebutuhan listrik	12 bulan	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Inspektorat Daerah	Persentase jasa umum dan penunjang perangkat daerah	90%
				Jumlah kebutuhan telepon	12 bulan				
24		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60,000,000	Jumlah kebutuhan jasa kebersihan 3000 m2	12 bulan	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Inspektorat Daerah	Persentase jasa umum dan penunjang perangkat daerah	90%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		340,000,000						

		Pemerintahan Daerah								
25			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120,000,000	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	20 unit	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Inspektorat Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang laik fungsi	90%
26			Pemeliharaan Mebel	20,000,000	Jumlah mebeleur yang dipelihara	20 unit	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Inspektorat Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang laik fungsi	90%
27			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75,000,000	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	37 unit	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Inspektorat Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang laik fungsi	90%
28			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	125,000,000	Luas gedung kantor yang dipelihara	1200 m2	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Inspektorat Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang laik fungsi	90%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		934,696,000						
29			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	300,000,000	Jumlah obwas yang diaudit dan dimonitor	8 OPD	Kabupaten Nganjuk	Kabupaten Nganjuk	Terselenggaraan ya pengawasan internal	100%
30			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	124,696,000	Jumlah obwas yang diaudit dan dimonitor	10 OPD	Kabupaten Nganjuk	Kabupaten Nganjuk	Terselenggaraan ya pengawasan internal	100%

31		Reviu Laporan Kinerja	10,000,000	Jumlah dokumen LKjIP yang direviu	-	Kabupaten Nganjuk	Inspektorat Daerah	Terselenggarakan ya pengawasan internal	100%
				Jumlah dokumen LPPD yang direviu	1 dokumen				
32		Reviu Laporan Keuangan	50,000,000	Jumlah dokumen LKPD yang direviu	1 dokumen	Kabupaten Nganjuk	Inspektorat Daerah	Terselenggarakan ya pengawasan internal	100%
				Jumlah OPD yang direviu	30 OPD				
				Jumlah dokumen RKA PD	50 OPD				
33		Pengawasan Desa	150,000,000	Jumlah obwas yang diaudit dan dimonitor	264 desa	Kabupaten Nganjuk	Kabupaten Nganjuk	Terselenggarakan ya pengawasan internal	100%
34		Kerjasama Pengawasan Internal	50,000,000	Gelar pengawasan yang dilakukan	1 kali	Kabupaten Nganjuk	Kabupaten Nganjuk	Terselenggarakan ya pengawasan internal	100%
				Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi sistem dan prosedur pengawasan	100 ASN				
35		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	250,000,000	Inventarisasi kode temuan hasil pengawasan	100%	Kabupaten Nganjuk	Kabupaten Nganjuk	Terselenggarakan ya pengawasan internal	100%
				Jumlah evaluasi yang dilakukan	4 kali				
				Tindak Lanjut hasil temuan pengawasan yang selesai	95%				
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		75,000,000						

36			Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	25,000,000	Pelimpahan kasus yang ditangani	90%	Kabupaten Nganjuk	Kabupaten Nganjuk	Terselenggaranya pengawasan dengan tujuan tertentu	95%
37			Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	50,000,000	Kasus pengaduan yang ditangani	96%	Kabupaten Nganjuk	Kabupaten Nganjuk	Terselenggaranya pengawasan dengan tujuan tertentu	95%
					Jumlah obwas yang diaudit dan dimonitor	4 OPD				
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		90,000,000						
38			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	30,000,000	Jumlah dokumen pengawasan yang disusun	2 dokumen	Kabupaten Nganjuk	Kabupaten Nganjuk	Tersusunnya kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	100%
39			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	60,000,000	Cakupan klinik konsultasi	6 kecamatan	Kabupaten Nganjuk	Kabupaten Nganjuk	Tersusunnya kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	100%
		Pendampingan dan Asistensi		380,000,000						
40			Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	90,000,000	Evaluasi dan pemantauan SPIP	30 OPD	Kabupaten Nganjuk	Kabupaten Nganjuk	Terselenggaranya pendampingan dan asistensi	85%
					Jumlah ekspose pengawasan komprehensif	24 kali				
					Jumlah dokumen SAKIP yang dievaluasi	50 dokumen				

41		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	40,000,000	Jumlah perangkat daerah yang didampingi	50 OPD	Kabupaten Nganjuk	Kabupaten Nganjuk	Terselenggarakan ya pendampingan dan asistensi	100%
42		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	200,000,000	Jumlah pelaporan gratifikasi pada perangkat daerah yang ditangani	100%	Kabupaten Nganjuk	Kabupaten Nganjuk	Terselenggarakan ya pendampingan dan asistensi	100%
				Terlaksananya asistensi rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi	14 OPD				
				Terlaksananya pembinaan dan koordinasi satgas saber pungli	12 bulan				
43		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	50,000,000	Jumlah perangkat daerah yang didampingi	50 OPD	Kabupaten Nganjuk	Kabupaten Nganjuk	Terselenggarakan ya pendampingan dan asistensi	100%
JUMLAH			Rp 10,815,696,000.00						

BAB V

PENUTUP

- 4.1. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Agar pelaksanaan bisa memperoleh hasil yang maksimal khususnya yang dilaksanakan oleh Inspektorat maka harus sesuai peraturan perundangan, dan tetap memperhatikan sinergitas antar semua pihak, serta rasa dedikasi dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

- 4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan terdapat permasalahan, yaitu :

- a. Keterbatasan waktu karena pemeriksaan khusus, permintaan joint audit dengan BPKP, Inspektorat Jendral dan Inspektorat Provinsi Jawa Timur, Aparat Penegak Hukum (APH) serta pemeriksaan dari BPK selaku Auditor eksternal yang cukup menyita waktu, tenaga dan pemikiran, upaya semaksimal mungkin telah dilaksanakan namun tetap belum dapat menjangkau dan menyelesaikannya,
- b. Keterlambatan penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), karena keterbatasan tenaga pemeriksa dan personil pendukung di Irban maupun Sekretariat.

- 4.3. Rencana Tindak Lanjut

- a. Meningkatkan kualitas SDM dengan mengirim tenaga pemeriksa dan seluruh tenaga pendukung mengikuti diklat-diklat yang berhubungan dengan pengawasan dan diklat-diklat lainnya, memperdalam pengetahuan di bidang pengawasan melalui Pelatihan Kantor Sendiri (PKS), sehingga mampu berkomunikasi dengan baik dengan semua pihak atas seluruh materi pengawasan.
- b. Menyusun PKPT Tahun berjalan dengan menggunakan pertimbangan penyusunan PPBR dengan menggunakan pendekatan maturitas SPIP.

- a. Mengoptimalkan fungsi consulting dalam pendampingan program kerja Perangkat Daerah.
- b. Meningkatkan efisiensi waktu dan kualitas penerbitan LHP, sehingga tidak terjadi keterlambatan penerbitan LHP.
- c. Penambahan personil tenaga pemeriksa, staf pengelola administrasi penerbitan Laporan dan pemantauan tindak lanjut, serta staf pendukung di sekretariat.
- d. Memfasilitasi agar Jabatan Fungsional segera terbentuk untuk mendukung kekurangan jumlah tenaga Auditor yang berkualitas.
- e. Upaya yang akan dilakukan agar setiap temuan hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti adalah dengan cara :
 - ❑ Meningkatkan dan mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
 - ❑ Mengoptimalkan Gelar Pengawasan dan Evaluasi Tindak Lanjut, dengan cara mengumpulkan Obrik guna melakukan dialog dan memberikan pengarahan tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan sehingga terjadi komunikasi dalam penyelesaian tindak lanjut.
 - ❑ Secara berkelanjutan melakukan pendekatan kepada SKPD yang belum menyampaikan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan;
 - ❑ Secara rutin melaksanakan penagihan kepada SKPD yang belum menyampaikan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan;
- ❑ Melakukan sosialisasi kepada SKPD dan masyarakat terkait dengan tata cara pengaduan masyarakat.

Nganjuk, 21 Juli 2021


Ir. FADJAR JUDIONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640311 199303 1 012